

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ditengah situasi yang sangat dinamis, pemerintah dituntut untuk *responsive* dalam mengambil langkah yang cepat dan tepat. Prinsip *agile governance* menjadi hal yang vital untuk merespon tantangan yang ada. Konsep *agile governance* atau disebut pemerintahan yang tangkas, cergas, serta cepat dalam merespon dan mengkoordinasikan organisasi sudah sering dibahas didunia akademis, terlebih pada administrasi publik. Luna, Kruchten, dan Moura (2015) mendefinisikan *agile governance is the ability of human societies to sense, adapt and respond rapidly and sustainably to changes in its environment, by means of the coordinated combination of agile and lean capabilities with governance capabilities, in order to deliver value faster, better, and cheaper to their core. Agile governance* hadir untuk memberikan dorongan kepada seseorang agar mampu menerapkan tata kelola organisasi yang cepat yang dapat memberikan peningkatan pada proses kinerja dan produktivitas dalam wilayah organisasi (Luna, 2015). Saat ini, *agile governance* memiliki arti penting sebagai skill dasar pemerintahan karena untuk bertahan dan menyeimbangi perkembangan serta menanggapi apa yang diinginkan warga secara cepat dan efisien. Melalui metode *agile governance* akan mempengaruhi pemerintah untuk berfokus pada kecepatan dan ketangkasan yang responsif dan adaptif.

Penelitian (Luna, Krutchen, dan Moura, 2015) *agile governance* dapat terwujud apabila pemerintah dapat menerapkan 6 prinsip yaitu, (1) *good enough governance*: tata kelola harus disesuaikan dengan konteks organisasi, (2) *human focused*: bahwa masyarakat harus dihormati dan diberi ruang untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, (3) *systematic and adaptive approach*: tim harus mampu beradaptasi untuk dapat merespon perubahan secara cepat dan sistematis, (4) *based on quick wins*: berbasis keberhasilan yang cepat seperti terdapat target, (5) *simple design and continuous refinement*: desain atau inovasi yang simpel dan berkelanjutan, (6) *business driven*: tindakan dan keputusan yang diambil harus sesuai dengan bisnis yang dilakukan. Biasanya *agile governance* lebih sering digunakan dalam dunia swasta. Namun peradaban membuat pemerintah tidak boleh ketinggalan. Inovasi dan praktik yang tangkas dan cepat menjadi suatu hal yang diharapkan oleh publik (Luna et al., 2015). Mengamini apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo baru-baru ini pada acara peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2020. Negara hadir apabila pelayanan publik yang diberikan cepat, profesional, berkeadilan dan berkualitas. Dengan catatan konsisten melakukan perbaikan yang masif. Mulai dari sistem, tata kelola, perubahan pola pikir, hingga budaya kerja atau birokrasi yang bersih dan anti KKN. Bahkan presiden menyatakan bahwa model pelayanan publik kita masih sangat kaku, sangat prosedural, sangat administratif. Padahal publik hari ini sudah bertransformasi dengan perubahan teknologi yang cepat.

Berdasarkan UU No. 6 Pasal 18 tentang Desa, “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”. Keluarnya UU tersebut, melahirkan pemerintahan desa yang diberi kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri. Pemerintah desa dituntut untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya yang dimiliki. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan organisasi yang paling depan dan terdekat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk meningkatkan kinerjanya agar sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Kinerja didefinisikan sebagai perkiraan mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan dalam menjalankan sasaran, tujuan, dan visi misi organisasi (Bastian, 2006:274). Ini berarti bahwa kinerja organisasi merupakan ukuran pencapaian terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi tersebut. Pengukuran kinerja merupakan alat untuk mengukur kesuksesan organisasi (Mahmudi, 2011:12). Untuk dapat menyelenggarakan pemerintah desa yang maksimal tidaklah mudah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang baik perlu adanya dukungan dari berbagai faktor, baik itu faktor individu maupun faktor kelompok atau organisasi.

Sampai saat ini kinerja Pemerintah Desa Kepulungan dalam menjalankan pemerintahan desa belum maksimal. Melihat bahwa Desa Kepulungan dalam berbagai segi pelayanan dan pengambilan kebijakan dinilai masyarakat berjalan secara lambat, salah satunya seperti dalam pelayanan pembuatan dokumen

kependudukan, dimana dalam prosesnya berjalan rumit dan panjang. Minimnya informasi yang diberikan tersebut, karena tidak adanya platform digital yang dapat diakses masyarakat untuk dapat memperoleh informasi mengenai prosedur pembuatan dokumen kependudukan. Permasalahan tersebut yang menjadikan masyarakat menilai bahwa pelayanan dan pengambilan kebijakan menjadi begitu lamban dan tidak sesuai dengan salah satu visi misi desa yaitu meningkatkan tata kelola yang baik dan berkualitas (Sumber: RPJM Desa Kepulungan). Maka dari itu, tata kelola pemerintah yang baik berkaitan erat dengan kinerja organisasi. Artinya, tanpa kinerja yang baik dari suatu organisasi pemerintahan, maka dapat dipastikan bahwa tata kelola yang baik tidak akan terwujud. Hal ini juga berkaitan dengan teori *agile governance* dalam prinsip *good enough governance*, yang berarti latar dari organisasi harus selalu diperhatikan dan menjadi acuan dalam tata kelola organisasi yang baik.

Berdasarkan paparan di atas dimana kinerja pemerintah desa harus mengikuti perkembangan zaman sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat juga disesuaikan dengan tujuan organisasi. Maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Kinerja Pemerintah Desa Kepulungan Dalam Perspektif *Agile Governance*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja Pemerintah Desa Kepulungan dalam perspektif *agile governance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kinerja Pemerintah Desa Kepulungan yang dilihat dari perspektif *agile governance* dalam melaksanakan pemerintahan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan keilmuan terutama dalam penerapan teori administrasi publik dalam praktek, serta perkembangan ilmu administrasi publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Menjadi *guidance* bagi pemerintah desa dalam konteks penerapan *agile governance*.
- b. Menjadi masukan parameter *stakeholders* desa dalam mengukur penerapan *agile governance*.